

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Apeldoorn, L. J. Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Sadino Utarid)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Aristoteles. 1997. *Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bean. 1962. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. Oxford: Martin Robertson.
- Bentham, Jeremy. 1960. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell.
- _____. 1962. *Principles of Penal Law*. New York: Russel and Russel.
- _____. 2005. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Cragg. 1992. *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. London, New York: Routledge.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

- H.R. Otje Salman S., dan Eddy Damian (ed). 2006. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johanes, 2003. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta: Refika Aditama.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung, Nusa Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Majelis Profesi Penilai Indonesia dan Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. 2018. *Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia Edisi VII – 2018*. Dilengkapi dengan Pedoman Penilaian Indonesia. Jakarta: Majelis Profesi Penilai Indonesia.
- Mill, John Stuart. 1861. *Utilitarianism*. United States: Bobbs Merrill Company.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nursidik. 2011. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Edisi 74. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Otto, Jan Michiel. 2003. *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

- Philips, O. Hood., Paul Jackson, and Patricia Leopold. 2001. *Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Radbruch, Gustav. 1961. *Einführung In Die Rechtswissenschaften*. Stuttgart: Koehler Verlag.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Buku I Agenda Pembangunan Nasional. www.bappenas.go.id. Diakses pada tanggal 09 Maret 2020.
- Sadono, Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: LPFE-UI.
- Salim, Wilmar dan Siwage Dharma Negara. 2018. *Infrastructure Development under the Jokowi Administration Progress, Challenges and Policies*. Journal of Southeast Asian Economies 35(3): 386-401. DOI: 10.1355/ae35-3e.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama.
- Sumantoro. 1990. *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumardjono, Maria S.W. 1993. *Tinjauan Yuridis Kepres No. 55/1993 Tentang*

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Konsepsi Hukum, Permasalahan dan Kebijakan dalam Pemecahannya). Jakarta: Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan BPN.

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.

Tarmidi, Lepi T. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi Universitas Indonesia.

Teichman, Jenny. 1998. *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

Widoatmodjo, Sawidji. *Juru Jitu Go Public*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Elek Media Komputindo.

Yong, Ohoitmur. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia.

Ziauddin, Sardar. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

Jurnal:

Adriyani, Novia. 2022. *Implikasi Yuridis Terhadap Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Negara Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*.
<http://repository.unissula.ac.id/26009/>

Firmansyah, Ade Arif. 2014. *Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah yang Berkeadilan*. Kanun Jurnal Hukum. No. 63.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/viewFile/6033/4971>, Diakses Pada Bulan Agustus 2014.

Faiz, Pan Mohamad. 2009. *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of*

Justice) . Jurnal Konstitusi. Vol. 6. No. 1. DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>, Diakses Pada Tanggal 1 April 2009.

Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.

Harjono, Dhaniswara K. 2023. *Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol. 2. No. 1. Diakses Pada tanggal 27 Januari 2023.

Jiwantara, Firzhal Arzhi. 2020. *Reformasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2317/pdf> Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2020.

Mulyadi, Mohammad. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara*. Vol. 2. No. 2. <https://www.studocu.com/id/document/institut-teknologi-budi-utomomo/indonesia/1262-2909-1-sm-education/60309296> Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2017.

Nafisah, Rohmatun. 2022. *Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Peneliti Madya pada Pusat Pengkajian Pengolah Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, email: susidhan@yahoo.com.

Rawls, J, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rongiyati, Sulasi. 2012. *Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Negara Hukum. Vol. 3 No. 1, Diterbitkan Pada Bulan Juni 2012.

Septo, Doni, Suparji, dan Anis Rifai. 2022. *Kepastian Hukum Jasa Penilai di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. VII. No. 02. DOI: <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1270/766> Diakses pada bulan Juli 2022.

Sufriadi, Yanto. 2011. *Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah di Bengkulu)*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 1. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4003>, Diakses pada bulan Juli 2011.

Bokings, J.C.R. 2022. "Dispute Settlement Model of Land Acquisition for Public Interest". *Damhil Law Journal* 2 (1): 1-16

Artikel di Internet :

Admin. 2023. *Tingkatan-Tingkatan Lembaga Peradilan di Indonesia*. Belajar Giat. <https://belajargiat.id/tingkatan-lembaga-peradilan/> Diakses Pada Tanggal 07 Juni 2023.

Afdan, Nur. 2015. *Pengertian Keadilan dan Macam-Macam Keadilan*.

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> Diakses Pada Tanggal 20 September 2023.

Ardhanti, Rakhmayani. 2023. *DJKN Selenggarakan Konsultasi Publik RUU Penilai di Yogyakarta*

(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/28899/DJKN-Selenggarakan-Konsultasi-Publik-RUU-Penilai-di-Yogyakarta.html>, Diakses Pada Tanggal 26 September 2023.

Fraby, M. Oscar. 2023. *Terdakwa Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Samsat Divonis Bebas*. Portal Berita Kalimantan.

<https://kalsel.prokal.co/read/news/50148-terdakwa-korupsi-pengadaan-lahan-kantor-samsar-divonis-bebas-mimpi-istri-jadi-kenyataan> Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2023.

Sari, Ayutia Nurita. 2022. *Konsultasi Publik RUU Tentang Penilai, Tampung Masukan Dari Berbagai Kalangan*.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-berita/29011/Konsultasi-Publik-RUU-tentang-Penilai-Tampung-Masukan-dari-Berbagai-Kalangan.html> Diakses Pada Tanggal 10 September 2023.

Suar Indonesia. 2023. *Terdakwa Keberatan Dengan Dakwaan JPU, Karena Merupakan Appraisal*. <https://suarindonesia.com/terdakwa-keberatan-dengan-dakwaan-jpu-karena-merupakan-appraisal/> Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2023.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Resyadi, Amin. 2018. *Peran Penilai Harga Tanah Dalam Penentuan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport)*.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11728/PERSEMBAHAN.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Brown, D. , 2004. *Land Acquisition: An Examination of the Principles of Law Governing the Compulsory or Resumption of Land in Australia*.
Sydney: Lexus-Nexis Butterworths
- Brown, D. , 2000. *Land Acquisition: An Examination of the Principles of Law Governing the Compulsory or Resumption of Land in Australia and New Zealand*, Sydney: Butterworths
- Denyer-Green, B. April 1982 - *Eminent Domain: A Comparative Discussion on the Assessment of Compensation in the United States and England*, *The Appraisal Journal*, , pp.213-219
- Gibbard, R. 2001 - *The Compulsory Purchase of Farmland: Identifying Severance and Injurious Affection Claims*, London,
- Harju, M.W. , 1987; Claurette, T.M. - *New Direction in Eminent Domain: The Emerging Issue of Enhancement*, *Appraisal Journal*, Volume 52, Issue 2, 1984, p.214, 346
- Hussain, R.A. - *Prinsip-prinsip dan Praktis Penilaian Harta Tanah*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Ismail, M. , 2008, *Pampasan Mencukupi di Negeri Kedah Darul Aman*,
Unpublished Ph.D. Thesis, Faculty of Geoinformation Science and

Engineering, Universiti Teknologi Malaysia

Kotaka, T, 2002 , General Theory of Administrative Law, Tokyo: Syosei Press

Kotaka, T. 2000, Japan's Land Use Law, Hawaii, University of Hawaii, The

Economic of Land Acquisition - Using Kotaka's Model in Land ... 133

Omar, I.; Ismail, M. 26- 27th September 2005, Defining Adequate Compensation

in Land Acquisition: A Case Study in Melaka, Seminar of Real Estate

Educators and Researchers Association Malaysia, , Universiti Teknologi

Malaysia, Kuala Lumpur

Rowan-Robinson, J. 1995 , Compensation for the Compulsory Acquisition of

Business Interest: Satisfaction or Sacrifice, Journal of Property Valuation &

Investment, Volume 13, Issue 1, pp 44-65.

Rowan-Robinson, J.; Hutchison, N.E. 2002, , Utility Wayleaves: A Compensation

Lottery, Journal of Property Investment & Finance, Volume 20, Issue 2,

pp.159-180

Sarkar, P.K. 1998 , Law of Land Acquisition of Land in India, Delhi: Eastern Law

House,

Usilappan 1998, Brief Notes on Land Acquisition Practice, Monograph

Pengambilan Tanah, Bangi: Inспен, 1999, p.129

Weisheit, B.P. 1989,, "Just" Compensation or Just Compensation? The Appraisal

Journal. Oktober pp.571-572 [16]. *** - The Board of Valuers,

Appraisers and Estate Agents, Malaysian Valuation Standards, Kuala

Lumpur: Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents Malaysia,

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontingen di Bagian Utara Selat Malaka.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975
Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan
Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228 / PMK.01/2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik.

Surat Keputusan Nomor 57/KMK.017/1996 tertanggal 06 Februari 1996 Tentang
Jasa Penilai Publik.

